

**MODEL KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG KETERANGAN SAKSI MELALUI
TELECONFERENCE SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA**

TESIS

**Diajukan Kepada
Program Studi Ilmu Hukum
Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister dalam Ilmu Hukum**



**Oleh
RUTH MARINA DAMAYANTI SIREGAR
NIM. R. 100 12 0011**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2014**

NOTA PEMBIMBING

Prof. Dr. Harun, SH, M.Hum

Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Nota Dinas

Hal : Tesis Saudara Ruth Marina Damayanti Siregar

Kepada Yth.

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap tesis saudara :

Nama	:	Ruth Marina Damayanti Siregar
NIM	:	R 100 12 0011
Konsentrasi	:	Hukum Pidana
Judul	:	Model Kebijakan Hukum Pidana Tentang Keterangan Saksi Melalui Teleconference Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana

Dengan ini kami menilai tesis tersebut dapat disetujui untuk diajukan dalam sidang ujian tesis pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Surakarta, September 2014

Pembimbing,



Prof. Dr. Harun, SH, M.Hum

NOTA PEMBIMBING

Prof. Dr. Supanto, SH, M.Hum

Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Nota Dinas

Hal : Tesis Saudara Ruth Marina Damayanti Siregar

Kepada Yth.

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

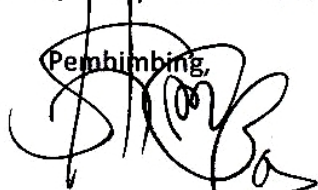
Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap tesis saudara :

Nama	:	Ruth Marina Damayanti Siregar
NIM	:	R 100 12 0011
Konsentrasi	:	Hukum Pidana
Judul	:	Model Kebijakan Hukum Pidana Tentang Keterangan Saksi Melalui Teleconference Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana

Dengan ini kami menilai tesis tersebut dapat disetujui untuk diajukan dalam sidang ujian tesis pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Surakarta, September 2014


Pembimbing,
Prof. Dr. Supanto, SH, M.Hum

TESIS BERJUDUL
MODEL KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG KETERANGAN
SAKSI MELALUI *TELECONFERENCE* SEBAGAI ALAT BUKTI
DALAM PERKARA PIDANA

yang dipersiapkan dan disusun oleh

RUTH MARINA DAMAYANTI SIREGAR

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

pada tanggal 18 Oktober 2014

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Pembimbing Utama


Prof. Dr. Harjun, S.H., M.Hum

Anggota Dewan Penguji Lain


Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum

Pembimbing Pendamping I


Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum

Pembimbing Pendamping II

Surakarta, 22 November 2014

Universitas Muhammadiyah Surakarta
Sekolah Pascasarjana
Direktur,




Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ruth Marina Damayanti Siregar

NIM : R 100 12 0011

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Judul : **MODEL KEBIJAKAN HUKUM TENTANG**

**KETERANGAN SAKSI MELALUI *TELECONFERENCE* SEBAGAI ALAT
BUKTI DALAM PERKARA PIDANA**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis yang saya tulis ini benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dan ringkasan-ringkasan yang telah saya jelaskan. Apabila di kemudian hari terbukti tesis ini jiplakan, gelar yang diberikan oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta batal saya terima.

Surakarta, September 2014

Yang Menyatakan



Ruth Marina Damayanti Siregar

MOTTO

Dengan ilmu hidup menjadi mudah
Dengan seni hidup menjadi indah
Dengan agama hidup menjadi bermakna
(Prof. H.A. Mukti Ali)

Tidak ada rahasia untuk menggapai sukses
Sukses itu dapat terjadi karena persiapan, kerja keras dan
mau belajar dari kegagalan
(Colin Powell)

Orang yang sabar pasti meraih keberhasilan meskipun
memerlukan waktu yang panjang
(Penulis)

PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini penulis persembahkan
untuk:

Orangtua tercinta yang selalu memberikan doa

Keluargaku tercinta

Sahabat dan teman-temanku

Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Model Kebijakan Hukum Pidana Tentang Keterangan Saksi Melalui Teleconference Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana”. Tesis ini ditulis dengan maksud untuk memenuhi persyaratan dalam rangka mencapai derajat Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak dapat tersusun dengan baik tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

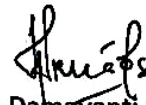
1. Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, selaku Direktur Program Studi Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta;
2. Ibu Wardah Yuspin SH, M.Kn, Ph.D, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta;
3. Prof. Dr. Harun, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, masukan dan koreksi sehingga menjadi lebih baik dan selesainya penulisan tesis ini;
4. Prof. Dr. Supanto, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan koreksi sehingga menjadi lebih baik dan selesainya penulisan tesis ini;
5. Bapak Moh. Yulihadi, SH, MH, selaku Ketua Pengadilan Negeri Magetan yang telah memberikan ijin untuk melanjutkan studi;
6. Seluruh Dosen dan staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta;
7. Ibu dan Bapak serta saudara-saudaraku yang selalu memotivasi dan memberi dukungan untuk menyelesaikan studi kepada penulis.

8. Keluarga kecilku tercinta, Daniel Mario Sigalingging SH, MH dan anakku Jonathan Evandrio Sigalingging, yang senantiasa memberi motivasi dan semangat untuk menyelesaikan studi kepada penulis.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari sepenuhnya keterbatasan yang dimiliki, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Akhirnya, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya.

Surakarta, September 2014

Penulis,



Ruth Marina Damayanti Siregar

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
NOTA PEMBIMBING I	ii
NOTA PEMBIMBING II	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR BAGAN	xii
DAFTAR TABEL	xiii
ABSTRAKS	xiv
<i>ABSTRACT</i>	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Orisinalitas	9
F. Metode Penelitian	11
1. Metode Pendekatan	11
2. Jenis Penelitian	11
3. Sumber Data	11
4. Teknik Pengumpulan Data	13
5. Teknik Analisis Data	14
G. Sistematika Penulisan	16

BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	18
	A. Landasan Teori	18
	1. Keterangan Saksi Melalui <i>Teleconference</i> Ditinjau Dari Sosiologi Hukum.....	18
	2. Kebijakan Hukum Pidana Tentang Alat Bukti Melalui <i>Teleconference</i>	24
	3. Perilaku Menyimpang sebagai Tindak Pidana dan Pengaturan Hukum Pidana.....	33
	4. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	41
	5. Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana dan Perkembangan Teknologi Informasi	48
	B. Penelitian Yang Relevan	56
	C. Kerangka Pemikiran	60
BAB III	KETERANGAN SAKSI SECARA <i>TELECONFERENCE</i> SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA	63
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	75
	A. Keterangan Saksi Secara <i>Teleconference</i> Sebagai Alat Bukti Dalam Peraturan Perundang-Undangan	75
	B. Pelaksanaan Keterangan Saksi Secara <i>Teleconference</i> Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Peradilan Pidana	92
	C. Model Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Keterangan Saksi Secara <i>Teleconference</i> Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana di Masa Yang Akan Datang	112
BAB V	PENUTUP	132
	A. Simpulan	132
	B. Saran	134
	DAFTAR PUSTAKA	137

DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 1 Kerangka Pemikiran	60

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Kesaksian Secara Teleconference dari Peraturan Perundang-Undangan	85

ABSTRAK

Ruth Marina Damayanti Siregar. NIM. R 100 12 0011. **Model Kebijakan Hukum Pidana Tentang Keterangan Saksi Melalui *Teleconference* Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana**. Tesis. Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2014.

Pemeriksaan keterangan saksi secara *teleconference* sampai saat ini masih terjadi pertentangan dalam pelaksanaannya di persidangan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang dapat memecahkan masalah tersebut sehingga kedudukannya sebagai alat bukti dalam persidangan lebih memberikan kepastian hukum. Tujuan penelitian adalah (1) untuk menjelaskan keterangan saksi melalui *teleconference* sebagai alat bukti diatur dalam aturan perundang-undangan. (2) Untuk menjelaskan pelaksanaan keterangan saksi melalui *teleconference* sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana. (3) Untuk menjelaskan model kebijakan hukum pidana mengenai keterangan saksi melalui *teleconference* sebagai alat bukti dalam perkara pidana di masa yang akan datang. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris. Jenis penelitiannya adalah penelitian deskriptif perskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Keterangan saksi secara *teleconference* sebagai alat bukti diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan salah satunya adalah Undang-Undang Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. (2) Pelaksanaan keterangan saksi melalui *teleconference* sah sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana apabila keterangan saksi di muka sidang pengadilan, dengan disumpah terlebih dahulu serta tentang peristiwa tertentu yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri. (3) Model kebijakan hukum pidana mengenai keterangan saksi melalui *teleconference* sebagai alat bukti di masa yang akan datang adalah kebijakan hukum secara formatif dengan melakukan amandemem KUHAP dan melalui kebijakan hukum materiil, yaitu syarat pelaksanaan penyelenggaraan kesaksian melalui *teleconference* yang meliputi: harus memenuhi ketentuan mengenai keterangan saksi sebagai alat bukti, jenis kejahatan yang dapat menggunakan sarana media *teleconference*, tempat pelaksanaan kesaksian diatur secara jelas dan para pihak yang ikut mendampingi saksi pada waktu *teleconference*.

Kata kunci: Kebijakan Hukum Pidana, Sistem Peradilan Pidana, *Teleconference*, Alat Bukti Perkara Pidana

ABSTRACT

Ruth Marina Siregar. R100120011. **Model of Criminal Law on Witness Testimony through Teleconference as Instrumental of Evidence**. The Graduate Program in Law Science, Muhammadiyah University of Surakarta, 2014.

The investigation of witness testimony through teleconference until recently still encounters opposition in its implementation. Therefore, a regulation for solving such a problem is required so that its position as evidence before the court provides more legal certainties. The objectives of this research are to explain: (1) witness testimony through teleconference as evidence as regulated in the prevailing laws and regulations; (2) implementation of witness testimony through teleconference as evidence in the criminal justice process; and (3) model of penal code policy on witness testimony through teleconference as evidence of crime in the future. This study employed the descriptive and prescriptive research method with the juridical empirical approach. The sources of data of research were primary and secondary ones. The data were gathered through in-depth interview and library research. They were analyzed by using the qualitative technique of analysis. The results of research show that: (1) the witness testimony through teleconference as evidence is regulated in several laws and regulations, and one of them is Witness and Victim Protection Code; (2) the implementation of witness testimony through teleconference as evidence is declared legally valid as evidence in the criminal justice process if it is presented before the trial court in which the witness shall make an oath first on certain events that he or she heard, saw, and experienced on his or her own; and (3) the model of penal code policy on witness testimony through teleconference as evidence of crime in the future is a formulation law policy through the amendment of Penal Code and material law policy. The requirements for the implementation of witness testimony through teleconference as evidence include the following: the implementation shall fulfill the provisions of witness testimony as evidence, the type of crimes shall have a possibility to be tried through the use of teleconference media, and the site for the implementation of witness testimony and the party (ies) accompanying the witness during the teleconference shall clearly be regulated.

Keywords: Criminal Law, Criminal Justice System, Teleconference, Instrumental of Evidence